

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang

Pasar global semakin kompleks, menuntut sesuatu yang beda dan baru. Konsumen negara maju menentukan pembelian produk dari negara berkembang dengan menetapkan berbagai kriteria seperti masalah harga, kualitas, *brand*, keunikan, ketersediaan dan sebagainya yang mensyaratkan penggunaan standar operasi yang telah mereka tentukan. Di samping itu, para pembeli dari negara maju semakin kritis tentang sistem produksi dari negara berkembang yang berkaitan dengan isu-isu konvensional seperti lingkungan, keamanan, makanan organik, tenaga kerja anak-anak, produk ramah lingkungan, gaji buruh dan praktek dagang. Akibatnya, timbul berbagai tuntutan untuk menjamin kelayakan suatu produk seperti bagaimana produk tersebut diciptakan, bahan baku yang digunakan berasal dari mana, dan apa dampaknya terhadap lingkungan dan bagaimana cara mengelola produk tersebut ketika sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan. Ini terjadi terutama untuk produk furnitur dan produk kayu dari negara berkembang yang diminta jaminannya tentang sumber bahan baku yang digunakan dan ancamannya terhadap keberlangsungan hutan hujan tropis (Morrisand Dunne, 2004). Kemudian, produk furnitur dari negara berkembang dituntut untuk mencantumkan sebuah tanda atau mata dagang yang biasa dikenal sebagai ekolabel (*ecolabelling*) (Kristanto, 2002) yang menunjukkan bahwasanya produk tersebut ramah lingkungan terutama dalam pengambilan bahan baku dari hutan. Saat ini, pembeli asing terutama dari Amerika Serikat, Jepang dan Eropa yang mensyaratkan sertifikat ekolabel kepada para produsen furnitur (Indrawan, 2012).

Industri furnitur dianggap sebagai salah satu penyebab rusaknya hutan akibat penebangan yang berlebihan dan pembalakan liar. Melalui pertemuan *International Tropical Timber Organization* (ITTO) yang diadakan di Bali pada tahun 1990 melahirkan komitmen untuk terlaksananya pengelolaan hutan yang lestari paling lambat pada tahun 2000. Sejak saat itu gagasan tentang ekolabel produk furnitur mencuat. Mulai tahun 2000, akan dilakukan pemberian label atau sertifikat pada produk yang terbuat dari kayu tropis. (Tunggal, 2008).

Tabel 1.1. Daftar 15 negara besar yang melakukan perdagangan furnitur secara global (dalam satuan jutaan Dolar Amerika)

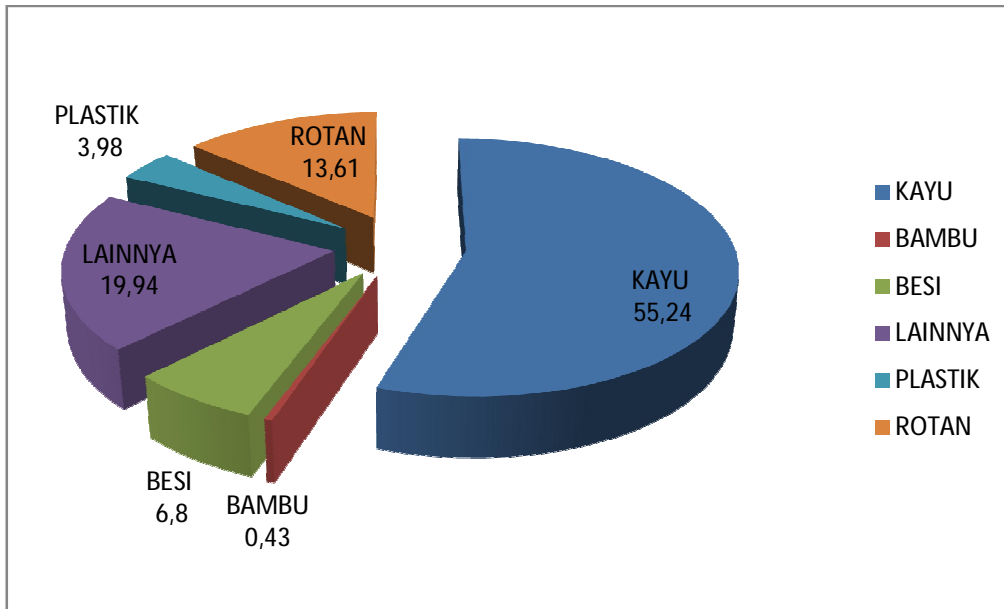
No	Negara	Nilai ekspor bruto tahun 2000	Nilai ekspor neto tahun 1995	Nilai ekspor neto tahun 2000	Prosentase nilai ekspor (1995-2000)
1	Italia	8359	7595	7395	-3
2	Cina	4582	1671	4412	164
3	Kanada	5179	685	2044	198
4	Polandia	2191	1180	1815	54
5	Indonesia	1518	819	1498	83
6	Malaysia	1596	826	1491	80
7	Denmark	1900	1687	1209	-28
8	Meksiko	3315	468	1173	151
9	Thailand	919	712	909	28
10	Spanyol	1453	523	531	2
11	Slovenia	586	409	461	13
12	Republik Cheko	780	148	445	201
13	Rumania	445	472	377	-20
14	Swedia	1298	510	338	-34
15	Brazil	496	212	333	57
	Total Sisa	22742			
	Jumlah Total	57388			

sumber: ITC ([www.intercern.org](http://www.intercern.org)) (Morris et. al., 2004)

*"Furnitur disini mencakup barang sudah difurnish yang terdiri dari item yang terbuat dari kayu, metal dan plastik.*

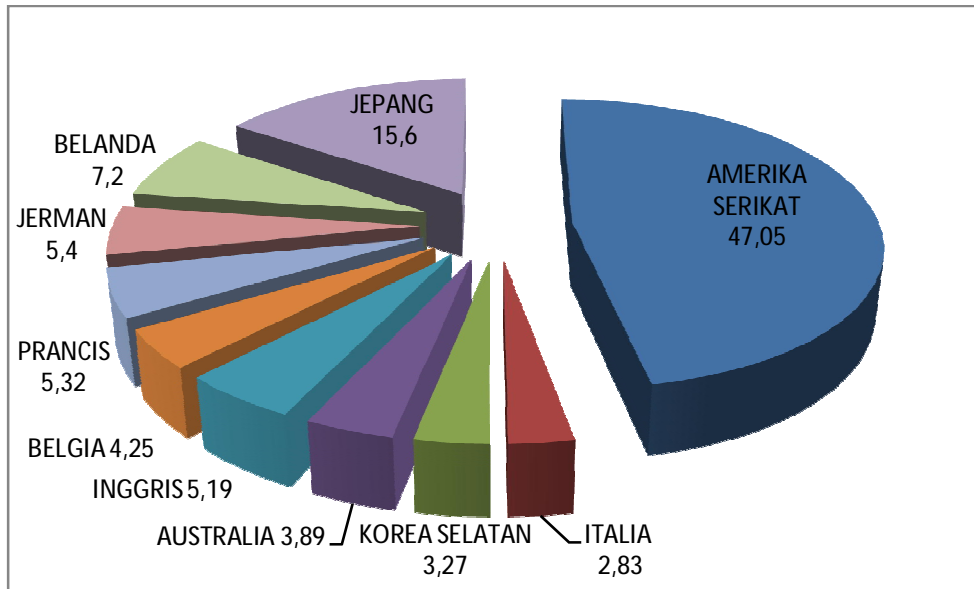
Industri furnitur merupakan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Kontribusi industri ini terhadap perolehan negara tidaklah kecil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai ekspor furnitur Indonesia pada tahun 2010 mencapai USD 1,96 milyar (Indrawan, 2012). Salah satu sentra industri furnitur yang besar di Indonesia adalah Jepara. Jepara telah lama dikenal dengan produk kerajinan baik itu ukir maupun mebel yang telah merambah baik itu pasar domestik maupun ekspor. Pada tahun 2011, total ekspor furnitur dari Jepara sebesar 10 % dari total ekspor yang ada (Purnomo, et. al., 2011)

Secara keseluruhan, ekspor furnitur Indonesia masih didominasi oleh furnitur berbahan baku kayu sebesar 55,24 %, disusul kemudian rotan (13,61 %), besi (6,80 %), bambu (0,43 %), dan material lainnya sebesar 19,94 %.



**Gambar 1.1.** Komoditi ekspor furnitur Indonesia yang digunakan sejak Januari 2013 sampai April 2013 (Sumber: Asmino, 2013)

Sebagai daerah yang mempunyai pengolahan kayu hasil hutan yang cukup besar, Industri furnitur di Jepara juga terkena dampak dari penerapan ecolabel tersebut. Konsumsi kayu yang cukup besar di Jepara sekitar 1,5 -2,2 juta m<sup>3</sup> (Departemen Kehutanan Republik Indonesia, 2004) baik itu dari hutan negara maupun rakyat menuntut adanya adanya suatu sistem terpadu yang dapat mencakup pada kelestarian hutan dan juga keberlangsungan industri furnitur itu sendiri. Jumlah konsumsi kayu tersebut ternyata masih melebihi kapasitas produksi kayu yang ada di pulau Jawa yang hanya sebesar 923.632 m<sup>3</sup>. Untuk memenuhi konsumsi kayu tersebut, maka memunculkan sebuah hipotesa baru mengenai bagaimana caranya mendapatkan pasokan kayu tersebut yang bisa saja didapatkan dari luar pulau Jawa atau bisa juga dilakukan melalui cara yang tidak sah (Roda, et. al, 2007). Karena itu penerapan sertifikasi keabasaan kayu perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan dan keberlanjutan industri furnitur itu sendiri.



**Gambar 1.2.**Prosentase negara tujuan ekspor produk furnitur Indonesia.

(Sumber: Asmindo, 2013)

Bak dua sisi mata uang, ekolabel mempunyai beberapa manfaat dan juga kendala. Manfaat yang bisa diperoleh oleh perusahaan misalnya produk yang dihasilkan mempunyai nilai jual dan daya saing yang lebih tinggi. Di samping itu, perusahaan yang telah memiliki ekolabel akan dapat mengikuti berbagai pameran yang diadakan oleh negara yang membutuhkan produk furnitur dari Indonesia. Namun di sisi lain, tingginya biaya sertifikasi ekolabel menjadi kendala utama khususnya bagi perusahaan kecil sehingga sulit untuk berkembang khususnya di Jepara yang sebagian besar industrinya adalah UKM (Roda et.al, 2007). Ambar Tjahjono, ketua umum Asmindo (Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia) mengatakan untuk pengurusan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) yang diwajibkan pemerintah paling tidak membutuhkan biaya sekitar 40 juta dan belum ditambah lagi dengan 15-40 juta dan ditambah lagi biaya untuk kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menelan biaya sekitar Rp. 15 juta – Rp. 40 juta. Biaya sebesar Rp. 45 juta akan meemberatkan bagi industri sekalas UKM (Usaha Kecil Menengah) (Khaddaf, 2013). Disamping itu, setiap negara mempunyai standar yang berbeda dalam penerapan ekolabel karena itu belum tentu suatu produk sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh suatu negara akan bisa diterima oleh negara lain karena standar yang berbeda (Iskandar, 1997).

Berbagai permasalahan yang menimpa para pengusaha furnitur dalam menerapkan ekolabel pada produknya akan menjadi salah satu tujuan dari penelitian ini. Tujuan lainnya

adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ecolabel pada suatu produk terhadap pemasaran produk itu sendiri.

### **1.2.Rumusan masalah**

1. Apa saja jenis ecolabel yang sudah diterapkan di beberapa perusahaan mebel di Jepara?
2. Masalah apa saja yang dihadapi pada penerapan ecolabel di industri mebel di Jepara?
3. Dampak apa saja yang didapat dari penerapan ecolabel pada produk industri mebel yang berbahan baku kayu di Jepara?

### **1.3.Tujuan penelitian**

1. Mengetahui ragam bentuk ecolabel yang diterapkan pada produk industri furnitur kayu di Jepara .
2. Mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi para pengusaha (pelaku industri) dalam menerapkan ecolabel pada produk furnitur mereka.
3. Menganalisa dampak positif dan negatif dari penerapan ecolabel pada pemasaran produk furnitur kayu di Jepara.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi *stakeholder*  
Memberikan gambaran kepada berbagai pihak mengenai implementasi ecolabel pada industri baik itu skala menengah maupun atas.
2. Bagi masyarakat  
Memberikan sebuah gambaran mengenai manfaat dan dampak yang dihasilkan dari pemberian ecolabel pada sebuah produk.
3. Bagi Pemerintah  
Memberikan masukan kepada pemerintah agar ecolabel benar-benar bisa berdampak secara signifikan terhadap kelestarian alam dan juga pemasaran produk itu sendiri.

### **1.5.Penelitian Yang Terdahulu**

Beberapa peneliti telah mencoba mengkaji ekolabel baik itu yang berkaitan langsung dengan industri furnitur maupun mengkaji tentang standar ekolabel yang cocok di terapkan pada negara berkembang seperti Indonesia:

1. Santoso,H., 2010. *Ekolabel Sebagai Instrument Pengelolaan Lingkungan Pada Industri Furnitur*, Semarang: Universitas Diponegoro.

Penelitian tentang ekolabel pada produk furnitur atau mebel pernah dilakukan Haryo Santoso, mahasiswa program doktor ilmu lingkungan UNDIP pada tahun 2010. Dalam penelitiannya, Haryo Santoso menyoroti tentang pengertian ekolabel sendiri serta berbagai usaha yang harus dilakukan agar ekolabel berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian didasarkan pada sumber data dari objek penelitian berasal dari 4 instansi non-industri (Perhutani, Asmindo, Disperindag Jateng dan Badan Lingkungan Hidup). Sementara dalam penelitian ini, penulis akan melakukan sebuah observasi tentang praktek dan masalah yang dihadapi para pengusaha furnitur atau mebel yang ada di Jepara, mengingat merekalah yang terkena dampak langsung dari adanya ekolabel tersebut.

2. Purnomo,H., Guizol,P., dan Muhtaman,D. R. 2009. Governing the teak furnitur business: A global value chain system dynamic approach, *Journal of Environmental Modelling & Software*.

Ekolabel pada industri furnitur lebih banyak menuai kendala. Pertama, tingginya biaya sertifikasi ekolabel dimana tidak memungkinkan semua perusahaan mampu untuk melaksanakannya. Kedua, produk yang bersertifikat belum tentu laris di pasar, mengingat tingginya biaya sertifikasi akan berpengaruh pada naiknya harga jual produk. Ketiga, kebanyakan konsumen masih memilih produk yang murah karena tidak bersertifikat dari pada produk bersertifikat yang mahal. Dalam kajiannya, nilai jual produk lebih rendah dari pada harga produk bersertifikat yang nilainya 6-30 %. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendukung dalam menilai efektifitas dan manfaat yang didapat dari penerapan ekolabel terhadap nilai produk furnitur di Jepara.

3. Morris, M. and Dunne, M., 2004. Driving environmental certification: its impact on the furnitur and timber products value chain in South Africa. *Journal of Geoforum* 35 (2004)

Morris dan Dunne meneliti tentang praktek ekolabel FSC yang ada di Afrika Selatan. Dalam penelitian mereka, ditemukan bahwasanya sertifikasi FSC memang banyak digunakan oleh para pengusaha furnitur khususnya mereka yang berorientasi ekspor ke

negara-negara Eropa. Di sisi lain, mereka menuai kendala seperti biaya sertifikasi yang cukup mahal dan produk yang bersertifikasi belum tentu bisa dipasarkan ke negara lain yang mempunyai sertifikasi yang berbeda. Seperti diketahui bahwa FSC hanya berlaku pada kawasan Eropa. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pengusaha harus mengurus sertifikasi yang berbeda dengan FSC sesuai dengan negara tujuan yang berarti harus mengeluarkan biaya sertifikasi lagi.

4. Thai, V. N., Morioko, T., Tokai, A., Yamamoto, Y., and Matsui, T., 2010. Selection of Product categories for national eco-labelling scheme in developing countries: a case study of Vietnames manufacturing sub-sectors, *Journal of Cleaner Production* Vol. 18 page 1446-1457.

Thai *et.al* (2010) berusaha untuk merumuskan skema ekolabel yang cocok untuk diterapkan pada negara berkembang dimana mengambil Vietnam sebagai studi kasus. Mereka beranggapan bahwa selama ini standar ekolabel yang digunakan masih mengacu pada standar yang digunakan oleh negara maju. Sedangkan dalam prakteknya standar negara maju belum tentu bisa dan cocok untuk diterapkan pada negara berkembang. Uji sertifikasi yang dibutuhkan sebelum pemberian lisensi ekolabel membutuhkan berbagai peralatan pendukung dimana ketersediaan peralatan tersebut tidak selengkap dan semurah pada negara maju sehingga dalam beberapa kasus mengakibatkan biaya ekonomi tinggi. Melalui penelitian ini ditemukan beberapa kriteria yang patut dan bisa diterapkan dalam praktek ekolabel untuk negara berkembang.

5. Espinoza, O., Buehlmann, U., and Smith, B. 2012. Forest certification and green building standard: overview and use in the U.S. hardwood industry. *Journal of Cleaner Production* Vol. 33 (2012) 30-41

Espinoza *et.al.* (2012) meneliti tentang sertifikasi hutan dan *green building* pada industri kayu keras di Amerika Serikat. Dalam penelitian tersebut, ditemukan beberapa temuan seperti penerapan ekolabel pada produk furnitur dengan mencantumkan logo dari lembaga yang melakukan sertifikasi terhadap hutan semisal FSC, atau SFI, memeberikan kesempatan bagi para pengusaha untuk menaikkan harga premium sebesar 15 % karena produk mereka ramah lingkungan. Secara matematis, keuntungan mereka akan meningkat karena dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi sebagai akibat dari penerapan logo yang juga menimbulkan biaya produksi. Namun konsumen di Amerika Serikat lebih memilih untuk

membeli yang tidak mencantumkan logo karena lebih murah dibanding dengan yang berlogo. Pilihan konsumen terhadap produk yang tidak berlogo disamping karena murah juga karena kondisi perekonomian di Amerika sedang mengalami krisis, meskipun konsumen menyadari produk yang murah tersebut tidak ramah lingkungan. Hasil penelitian mereka akan menjadi acuan kami, mengingat konsumen Indonesia mempunyai daya beli yang lebih rendah dibanding konsumen dari Amerika Serikat. Hal ini bisa dilihat dari lebih besar dan banyaknya furnitur yang berkualitas yang diserap pasar luar negeri dibanding dengan pasar domestik.

6. Pinuji, A.A., 2005. Dampak Sertifikasi Ekolabel; Studi Kasus Sertifikasi Lacak Balak Pada Industri Pengolahan Kayu di Indonesia. Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

Penelitian tersebut ditujukan untuk mengetahui implementasi pemberlakuan sertifikasi lacak balak dan untuk mengetahui dampaknya terhadap perusahaan pengolahan kayu bersertifikat di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode survei melalui pos. Target survei adalah 28 perusahaan pengolahan kayu yang telah bersertifikat lacak balak dengan skema FSC. Dalam survei digunakan kuisioner untuk mengetahui persepsi perusahaan terhadap ekolabel dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Pengukuran dampak sertifikasi dilakukan dengan membandingkan perubahan kinerja perusahaan sebelum dan sesudah perusahaan memproduksi produk kayu bersertifikat berdasarkan persepsi perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian bahwa sertifikasi lacak balak memberikan dampak yang positif terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang diukur dalam penelitian ini meliputi aspek operasional, keuangan dan pemasaran. Secara rata-rata, dari semua aspek kinerja perusahaan yang diukur, aspek pemasaran merupakan aspek yang dinilai paling mendapatkan dampak positif. Dari hasil analisis juga menunjukkan semua aspek yang dinilai secara signifikan pada tingkat kepercayaan 95% mendapatkan dampak yang positif dari sertifikasi, kecuali pada efisiensi biaya produksi dan kapasitas produksi. Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan jika dibandingkan antara biaya sertifikasi dan manfaatnya (*costs vs benefits*), berdasarkan perspektif perusahaan, tidak dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh dari sertifikasi melebihi biaya sertifikasi yang telah dikeluarkan.

Faktor-faktor yang dianggap paling penting yang dipertimbangkan perusahaan untuk mendapatkan sertifikat adalah faktor-faktor pemasaran jika dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor yang dianggap paling penting yang dipertimbangkan perusahaan adalah untuk menghindari kondisi atau situasi yang merugikan di kemudian hari; faktor *image* atau publikasi positif yang akan didapatkan; permintaan dari pasar yang sedang dilayani; dan akses ke pasar yang lebih baru. Hambatan utama dari pemberlakuan sertifikasi lacak balak di Indonesia adalah sangat terbatasnya pasokan kayu bersertifikat di dalam negeri. Berdasarkan persepsi perusahaan, dari hasil uji Kruskal Wallis juga menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan bahan baku kayu bersertifikat dari dalam negeri (domestik), secara rata-rata dinilai mempunyai dampak positif yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang mengimpor bahan bakunya, yaitu dampak terhadap kinerja pengendalian bahan baku, laba perusahaan, volume penjualan, pangsa pasar, nilai penjualan ekspor, dan terhadap volume ekspor.

7. Yulianti, E., 2003. Ekolabelling Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Yang Berwawasan Lingkungan. Mester Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro: Semarang.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui alasan pelaksanaan ekolabel. Selain itu dimaksudkan juga untuk mengetahui implementasi ekolabel dan kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menemukan bahan-bahan mengenai ekolabel dan standarisasi internasional di bidang lingkungan hidup.

Alasan pelaksanaan ekolabel bagi produk hutan adalah terwujudnya kelestarian hutan dan mencegah penebangan liar. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya.

Implementasi ekolabel dilakukan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), dimana telah mengembangkan empat sertifikasi sumberdaya hutan yaitu sertifikasi lacak-balak, Pengelolaan Hutan Produk Lestari (PHPL), Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBML), Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL).

Kendala yang dihadapi LEI dalam melaksanakan sertifikasi ecolabel yaitu adanya kesenjangan antara persyaratan pengelolaan hutan lestari dengan kemampuan unit manajemen.